ABSTRAK

Sengketa delimitasi Laut Timor yang melibatkan Timor Leste dan Australia yang telah berlangsung selama satu dekade lebih, memasuki babak baru. Timor Leste membawa sengketa tersebut ke *The Permanent Court of Arbitration* di Den Haag, sebagai langkah terakhir dalam upaya penyelesaian sengketa yang telah merenggut kedaulatan di wilayah maritim negara yang baru merdeka tahun 2002 tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi diplomasi Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa delimitasi Laut Timor dengan Australia melalui konsep *multritrack diplomacy.*

Penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif dengan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan langkah diplomasi yang ditempuh Timor Leste dalam merumuskan resolusi konflik dalam penyelesaian sengketa delimitasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Dili, Timor Leste yang beralamatkan kantor NGO *La'o Hamutuk* dan *Maritime Boundary Office.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkaian proses diplomasi melalui multitrack diplomacy yang merupakan kolaborasi dari sistem multi pilar kemitraan, kemudian menghasilkan resolusi konflik secara damai melalui *Compulsory Concilliation,* dibawah Komisi Konsiliasi dengan pengawasan PBB, sebagai resolusi konflik paling efektif dalam sengketa Laut Timor, karena Timor Leste dan Australia berhasil menyepakati sebuah perjanjian baru yaitu Perjanjian Laut Timor 2018 yang mengatur mekanisme penetapan batas Laut Timor secara permanen dan menetapkan kepemilikan Ladang *Greater Sunrise* yang merupakan ladang minyak dan gas alam terbesar di Laut Timor kedalam wilayah kedaulatan Timor Leste.

Kata kunci : sengketa delimitasi, Timor Leste-Australia, kedaulatan negara, Laut Timor, *multitrack diplomacy*, *compulsory concilliation.*

ABSTRACT

The Timor Sea delimitation dispute involving Timor Leste and Australia which has lasted for more than a decade, is entering a new chapter. Timor Leste brought the dispute to The Permanent Court of Arbitration in Den Haag, as the final step in efforts to resolve disputes that had claimed sovereignty in the maritime territory of the newly independent country in 2002. This study discusses East Timor's diplomatic strategis in resolving the Timor Sea delimitation dispute with Australia.

This study uses an explanatory research by applying qualitative research methods to explain the diplomatic steps taken in East Timor in formulating conflict resolution of delimitation disputes.

This research was carried out in Dili, East Timor which addressed the office of the NGO La'o Hamutuk and the Maritime Boundary Office. The results show the stage of the diplomacy process through multitrack diplomacy which is a collaboration of a multi-pillar partnership system, which then result in conflict resolution through peaceful compulsory concilliation under the Concilliation Commision with Unites Nations supervision, is considered most effective conflict resolution in the Timor Sea dispute because Timor Leste and Australia succeeded in agreeing on a new agreement in the 2018 Timor sea that was agreed to penetrate the Timor Sea boundary of the Greater Sunrise Field which is an oil and gas field the largest natural area in the Timor Sea becomes the sovereign territory of East Timor.

Keywords: delimitation dispute, Timor Leste-Australia, state sovereignty, Timor Sea, multitrack diplomacy, compulsory concilliation.